

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Yogyakarta. Penerbit Yayasan Obor. 2021.
- Asshiddiqie, Jimly dan Ali M, Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006.
- Basah, Sjachran, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung. Alumni Bandung. 1992.
- Brotodihardjo, R Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung. Refika Aditama. 2003.
- Burns, Peter. *The Leiden Legacy: Concept of Law in Indonesia*. Leiden. KITLV Press. 2004.
- Byan (ed.), *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta .Departemen Keuangan RI Badan Pengkaji Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional Pusat Evaluasi Pajak Retribusi Daerah dan PT Yellow Mediatama. 2005.
- Gede, Ni Luh dkk, *BERAKHIR DI TEMON: Perdebatan Panjang Pengadaan Tanah untuk New Yogyakarta International Airport (YIA)*. Yogyakarta. STPN Yogyakarta Press. 2020.
- Hadhikusuma, T Sutantya R. dan Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum*. PT Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta. Djambatan. 2008.
- HS , Salim dan Nurbaini Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2013.
- Iliyas, Wirawan, dkk. *Perpajakan : Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-Undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru*. Bogor .Mitra Wacana Media Penerbit. 2012.

- Ismail, Tjip. *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Prenadamedia. 2018.
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta. Nusamedia. 2009.
- Lotulung, Paulus E. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta, Penerbit Andi Offset, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- _____, *Teori Hukum*, Yogyakarta, Penerbit UAJY. 2011.
- _____, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty. 1996.
- Munawir. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta. Liberty. 1982.
- Mustofa, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Yogyakarta, Karya Media, 2014.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di bidang Pajak*, Jakarta. Salemba Empat. 2007.
- _____, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di bidang Pajak*. Jakarta. Salemba Empat. 2007.
- Rasjidi, Lili dan Putra, I.B Wysa, , *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung Remaja Rosdakarya, 1993.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta , UII Press, 2002.
- Rochmat Soemitro , *Pajak Bumi dan Banguna*. .Bandung. PT Eresco, 1989.
- Rusjdi , Muhammad, *PBB, BPHTB, Bea Materai*. Klaten .Indeks dan PT Macanan Jaya Cemerlang, 2008.
- Santoso, Urip, , *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana Predana Media, 2010.
- _____, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah* Jakarta, Jakarta Kencana Predana Mediaf, 2007.
- _____. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Material*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- _____, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) sebagai Pajak Daerah*, Jakarta, Agung Seto, 2011.
- Siki, Renhat Marlianus dkk, *Kelayakan Saksi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Bali, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014.
- Sirajuddim, Ibrahim, Anis dkk., *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press, 2016.
- Soemitro , Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1985.
- Soemitro ,Rochmat dan Sugiharti, Dewi Kania, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Soemitro, H. Rockmadi, *Pajak Bumi dan Bangunan* , Bandung, Revika Aditama, 2001.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2007.
- Soerodjo, Irawan, *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak atas Tanah di Indonesia*, ,Surabaya, Arloka, 2003.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2006.
- Suandy,Early, *Hukum Pajak* , Jakarta, Salemba Empat, 2016.
- Sudirman , Rismawati dan Amiruddin, Antong, *Perpajakan: Pendekatan Teori dan Prakti*, Malang.Empat Dua Media, 2012.
- Sumardjono, Maria S.W, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian: Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta , Gramedia, 1997.
- Sunggono, Bambang, 1998, *Metode Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta , PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Suparmoko. *Asas Asas Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta. Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 1979.
- Suparnyo, *Hukum Pajak: Suatu Seketsa Asas*, Semarang, Pustaka Magister, 2012.

- Susanti, Dyah Ochtorina dan Efendi, Aan, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Waluyo dkk. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat. 2003.
- Widyaningsih, Aristanti. *Hukum Pajak dan Perpajakan: dengan Pendekatan Mind Map*. Bandung. Penerbit Alfabeta, 2011.
- Zainuddin, Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

B. Artikel dan Jurnal

- Advianto, L.Y.Hari Sih, “Pengakuan dan Perlindungan Huku Hak Wajib Pajak Dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia”. Simposium Nasional Keuangan Negara, 2018.
- Azdy, Rezanía Agramanisti. “Tanda Tangan Digital Menggunakan Alogaritme Keccak dan RSA” JNTETI, Vol. 5, No. 3, Agustus, 2016.
- Budiyono, Agus. “Pelaksanaan *E-Billing* Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak”, Jurnal Kebijakan Publik, Volume 9 Nomor 1, Maret, 2018.
- Adrianto Dwi Nugroho, “Kedudukan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Hukum Acara Perpajakan di Indonesia”. Mimbar Hukum Edisi Khusus, November, 2011.
- Gianakoudi, Sofia. “Internet banking: The digital voyage of banking and money in cyberspace”, *Information & Communications Technology Law*, Vol. 8, No. 3, 1999.
- Nur, Ichwan, Saifulah. “*Pertama Kali, PAD Sleman Tembus Rp1,047 Triliun*”. Kedaulatan Rakyat. Yogyakarta, 2023.
- Nisya, Intifada Atin “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”, *Hukum*

Bisnis, Universitas Narotama Surabaya, Volume 3 Nomor 1, April 2019.

Kelly,Roy.”*The Property Tax Reform Experience from 1986-2001*”.Lincoln Institute of Land Policy. Jstor.com, diakses 30 Maret, 2023.

L.Y. Hari Sih Advianto “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Hak Wajib Pajak dalam Sistem Hukum Pajak Indonesia, *Jurnal*, Simposium Nasional Keuangan Negara.

Prayoga, R. Tony, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 No.02-Juni, 2016.

Wijayanta, Tata,“Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Vol. 14 No. 2 Mei, 2014.

Wahdan, Ardhi, “2023, *Pemkot Yogya Menargetkan Rp.104 Miliar*”. Yogyakarta Kedaulatan Yogyakarta, 2023.

C. Laman Internet

Ada Tua Simbolon,2021, Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Atas Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan Di Kabupaten Samosir oleh Ada Tua Simbolon, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/164942-ID-peranan-pejabat-pembuat-akta-tanah-ppat.pdf> pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2021 pukul 10.00 WIB

Admin01, 2022, “Pemantauan dan Penyampaian SPPT PBB P2 Tahun 2022 Oleh BKAD Kab.Sleman”,<https://sendangmulyosid.slemankab.go.id/first/artikel/146-Pemantauan-dan-Penyampaian-SPPT-PBB-P2-Tahun-2022-Oleh-BKAD-Kab--Sleman>, diakses tanggal 3 Januari 2023, pukul 14.00 WIB.

Anonim, 2023, “Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Pembayaran Perdana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun 2023”pada laman web <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1834/pendampingan-pengisian-formulir-clearing-cleansing-data-tunggakan-pbb-p2->

kalurahan- kembang 3 Februari, 2023, diakses pada 3 Februari 2023 pukul 09.17 WIB.

Admin01, 2023, "Cetak SPPT PBB P2 Massal" diakses melalui <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1925/cetak-sppt-pbb-p2-massal>, pada 19 Maret 2023 pukul 19.17 WIB.

Anonim, Sertifikat diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sertifikat> pada tanggal 5 Mei 2023 pukul, 17.00 WIB.

Anonim, 2020, Selayang Pandang Sejarah Keadilan Pajak Dan Penerapannya, 7 Januari 2020, oleh Admin BDK Denpasar, diakses melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/artikel/balai-diklat-keuangan-denpasar-selayang-pandang-sejarah-keadilan-pajak-dan-penerapannya-2020-01-07-0bfb8cbd/> pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.

Anonim, *Tribun*, 26 Mei 2023, "Target Pajak 2023 di Kulon Progo Sebesar Rp104,7 Miliar, Ini Sektor Penyumbang Terbesar", <https://jogja.tribunnews.com/2023/05/26/target-pajak-2023-di-kulon-progo-sebesar-rp1047-miliar-ini-sektor-penyumbang-terbesar>, diakses online pada laman TribunJogja.com pada 13 Juni 2023 pukul 07.00 WIB.

Arif Nur, 2022, "Pembagian SPPT PBB 2022", Arif Nur, 2022, "pembagian SPPT PBB Tahun 2022" <https://timbulharjo.bantulkab.go.id/first/artikel/741-pembagian-SPPT-PBB-Tahun-2022>, diakses 5 Januari 2023 Pukul 20.00 WIB.

Danar, "IPPAT Kulonprogo Keluhkan Layanan Pembayaran BPHTB Online", waktu unggah pada 5 April 2022 pukul 06.10 WIB <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/241740/ippat-kulonprogo-keluhkan-layanan-pembayaran-bphtb-online> diakses pada 13 Juli 2022 pukul 10.17 WIB.

Danar, 2022, "IPPAT Kulonprogo Keluhkan Layanan Pembayaran BPHTB Online", [krjogja.com, https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/241740/ippat-kulonprogo-keluhkan-layanan-pembayaran-bphtb-online](https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/241740/ippat-kulonprogo-keluhkan-layanan-pembayaran-bphtb-online), Diakses tanggal 3 Januari 2023 pukul 14.00 WIB.

Dani Julius Zebua, 2022, "Dulu Terdampak Bandara YIA, Kini Giliran Jalan Tol, Mantan Lurah di Kulon Progo: Saya Tak Bisa Tidur Tiap Malam", <https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/11/28/205212478/dulu-terdampak-bandara-yia-kini-giliran-jalan-tol-mantan-lurah-di-kulon?page=all>, diakses, 12 Mei 2023 Pukul 18.00 WIB.

- Dewantara, Jalu Rahman, “*Server BKAD Kulon Progo Eror 3 Bulan Bikin Notaris Kelabakan*”, waktu unggah pada 5 April 2022 pukul 14.41 WIB <https://www.detik.com/jateng/jogja/d-6017493/server-bkad-kulon-progo-eror-3-bulan-bikin-notaris-kelabakan> diakses pada 13 Juli 2022 pukul 10.17 WIB.
- Eka Arifa, 2022, “Pemkot Yogyakarta mulai distribusikan SPPT PBB 2022 kepada 95.660 Wajib Pajak”, <https://jogja.antaranews.com/berita/535489/pemkot-yogyakarta-mulai-distribusikan-sppt-pbb-2022-kepada-95660-wajib-pajak>, diakses tanggal 3 Januari 15.00 WIB.
- First Tania P.J., Catarina Manurung, Perpajakan., 2 Februari 2021, diakses melalui <https://binus.ac.id/character-building/2021/02/prinsip-prinsip-perpajakan/> pada hari Minggu, tanggal 25 Juni 2021 pukul 20.00 WIB.
- Ismijati Jennie, “Pengukuhan Prof Ismijati Jenie: Itikad Baik Sebagai Asas Hukum, waktu unggah pada 11 September 2007 pukul 14.48 WIB, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/2066-pengukuhan-prof-ismijati-jenie-itikad-baik-sebagai-asas-hukum/>, diakses pada 1 Desember 2022 pukul 12.17 WIB.
- Kusnadi, “Pemkab Kulon Progo Masuk 10 Besar Pemerintah Daerah Berkinerja Terbaik Nasional”, <https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/736278/pemkab-kulon-progo-masuk-10-besar-pemerintah-daerah-berkinerja-terbaik-nasional#>, diakses 13 Juni 2023 pukul 07.38 WIB.
- Rani Maulida, *Macam-Macam Pajak di Indonesia yang Perlu Anda Ketahui* oleh Rani Maulida, pada 18 Agustus 2018, diakses melalui <https://www.online-pajak.com/macam-macam-pajak> pada tanggal 5 Mei pukul 17.00 WIB. Anonim, 2011, *Waspadalah Para Notaris/PPAT Dalam Melakukan Pembayaran Pajak*, oleh Irma Devita, diakses melalui <https://irmadevita.com/2011/waspadalah-para-notarisppat-dalam-melakukan-pembayaran-pajak/>, pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 pukul 15.14 WIB.

D. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2016 tentang perubahan atas PP No 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Keputusan Menteri Keuangan No 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-632/MK.07/2010, tanggal 30 November 2010, tentang Percepatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2010 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Individual Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Individual Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, hlm 12-13.

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No. 61 Tahun 2010 tentang Juklak Perda No. 9 Tahun 2010 tentang BPHTB.

Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penesuaian Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023.

Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 464/C/2022 Tentang Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023.

E. Karya Ilmiah dan Tesis

Akhmad Sopanudin, “Konflik Lahan Pertanian Dalam Pembangunan Bandara Internasional di Kulon Progo”, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.

Setiono, *Rule of Law*, Surakarta . Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004.

Astuti Dwi Fajarwati, Pertimbangan Hakim Terhadap Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Kasus Pemalsuan Surat Setoran Pajak Penghasilan Ditinjau Dari Prinsip Equality Perpajakan, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021.

- Melinda, Resky. *“Penetapan Nilai Transaksi Sebagai Dasar Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dan Relevansinya dengan Asas Kebebasan Berkontrak”*. Tesis, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2017.
- N. Bryan Ready Putranto, *Pelaksanaan dan Parameter Penetapan Nilai BPHTB Atas Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kabupaten Klaten*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Nurhairani, Hesti. *“Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Bantul”*. Tesis, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2016.
- Nasution, Aulia Perdana H. *“Perlindungan PPAT Terhadap Perbedaan Penetapan Validasi Pajak Jual Beli Peralihan Hak atas Tanah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kabupaten Sleman”*. Tesis, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2016.
- Saputra, Johan *“Perlindungan Hukum Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Pajak Dibayarkan Dinyatakan Tidak Wajar Dalam Proses Validasi”*. Tesis, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2018.
- Yanottama Patria A, *“Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dalam Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Purworejo Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum”*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada, 2020.